

PEDULI ADAT DALAM BINGKAI INKLUSI



KEMITRAAN

Kata Pengantar

Salam Peduli.

Merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi Kemitraan atas diterbitkannya buku esai foto **Peduli Adat Dalam Bingkai Inklusi**. Buku ini merupakan bagian dari ikhtiar Program Peduli untuk mendorong terjadinya inklusi sosial bagi Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang Tergantung pada Sumber Daya Alam. Program Peduli sendiri lahir dari inisiatif pemerintah bersama dengan organisasi kemasyarakatan untuk memastikan bahwa kelompok minoritas di Indonesia menerima hak-haknya sebagaimana warga lainnya. Masyarakat adat merupakan salah satu dari lima kelompok minoritas lainnya seperti anak dan remaja rentan, kaum waria, orang dengan disabilitas, korban pelanggaran HAM, dan kelompok agama minoritas dan kepercayaan local yang berada dalam payung besar Program Peduli. Inklusi sosial kemudian menjadi sebuah pendekatan pilihan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan yang telah memerangkap kelompok minoritas.

Dalam dua tahun perjalanan Program Peduli bersama masyarakat adat di 13 provinsi yang kita damping bekerjasama dengan 14 mitra daerah, ditemukan permasalahan yang cukup kompleks di lapangan. Permasalahan ini diidentifikasi oleh mitra Peduli di daerah bersama dengan para kader dan community organizer program Peduli yang tinggal bersama (live in) masyarakat adat selama program ini berlangsung. Mereka menjelaskan bahwa kompleksitas permasalahan adat banyak terkait isu hilangnya wilayah hidup dan penghidupan kelompok adat akibat beralihnya fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan penguasaan korporasi atas tanah adat, diskriminasi dalam perolehan pelayanan publik, stigma negative masyarakat sekitar atas kelompok adat yang hidup berdampingan serta konflik tata batas antar wilayah. Hal-hal tersebut menjadikan masyarakat adat cukup rentan terhadap kemiskinan.

Berbagai permasalahan tersebut terekam dengan baik dalam buku ini yang menggambarkan secara visual mengenai persoalan panjang yang dihadapi masyarakat adat dalam hal kebijakan, pelayanan dasar dan

keberterimaan sosial yang menjadi penyebab terjadinya eksklusi. Beragam pendekatan dan strategi menjawab tantangan tersebut tersaji apik dan singkat dalam bingkai foto dan informasi program Peduli untuk memastikan bahwa inklusi sosial merupakan tujuan besar yang ingin dicapai dan diupayakan bersama oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan, masyarakat adat sendiri dan organisasi masyarakat.

Kemitraan sebagai pelaksana Program Peduli pilar adat menyadari sepenuhnya bahwa buku ini belum mampu menunjukkan kompleksitas isu adat di Indonesia secara menyeluruh. Namun demikian bersama dengan mitra Peduli di 13 provinsi, kami ingin memberikan sedikit gambaran beragam kesulitan yang alami masyarakat adat kita di tengah gempuran arus globalisasi yang memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dan berkompromi dengan kebajikan local yang telah turun temurun dijalankan. Besar harapan kami, buku ini mampu memberikan inspirasi bagi pembaca dan mendorong imajinasi kita untuk secara kreatif mampu menjaga kekayaan budaya kita yang tersimpan dalam kekayaan masyarakat adat Indonesia.

Monica Tanuhandaru
Executive Director
Partnership for Governance Reform.

Sambutan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku **Peduli Adat dalam Bingkai Inklusi** oleh Kemitraan. Buku ini merupakan rekaman pembelajaran, hasil capaian, maupun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam Program Peduli. Program Peduli merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil untuk mendorong proses integrasi dan inklusi sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini hidup dalam kondisi marjinal dan disekslusi dalam proses pembangunan maupun kehidupan sosial secara langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang tidak hanya mengalami eksklusi sosial dalam pembangunan karena kehilangan habitat hidup dan penghidupannya, kehilangan kontrol atas tanah dan sumberdaya alam, akan tetapi juga mengalami penolakan, diskriminasi, maupun stigma dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui buku Peduli Adat dalam Bingkai Inklusi ini, kita tidak hanya diajak untuk mengenal kehidupan dan perjuangan masyarakat adat untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman, akan tetapi juga mengenal lebih jauh terhadap persoalan-persoalan dasar yang masih dihadapi oleh mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat tidak hanya sebatas budaya dan kesenian semata, akan tetapi juga kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai yang selaras dan harmonis dengan alam. Walaupun seringkali masyarakat adat dianggap terbelakang, namun sesungguhnya mereka lebih maju dalam merawat dan memanfaatkan alam secara lebih bijaksana dibandingkan dengan praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya alam selama ini yang cenderung eksploitatif dan merusak ekosistem.

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat juga bersifat kompleks. Mereka tidak hanya berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak untuk mengelola sumberdaya alam, akan tetapi juga mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya yang saat ini mulai tergerus oleh perubahan zaman. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Program Peduli tentu belum dapat menjawab seluruh persoalan yang dihadapi oleh

masyarakat adat. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dan dukungan multipihak sesuai dengan peran yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Kemenko bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan sebagai pemangku kepentingan dalam Program Peduli akan berupaya untuk mendorong dan memfasilitasi agenda-agenda pemerintah yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat sebagai warga negara. Hal ini selaras dengan agenda Nawacita, yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara. Semoga dengan diterbitkannya buku ini, akan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukunganyang nyata dalam memberdayakan masyarakat adat di Indonesia.

I Nyoman Shoeida

Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, & Kawasan

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan

PEDULI ADAT DALAM BINGKAI INKLUSI



KEMITRAAN

Membangun Kemandirian Suku Anak Dalam (SAD)

SSS Pundi Sumatera

Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) merupakan kelompok suku yang hidup dalam kelompok-kelompok (rombong) kecil di sepanjang jalur Lintas Tengah Sumatera. Secara administratif mereka tersebar di Kabupaten Merangin, Sorolangun dan Bingo di Provinsi Jambi serta Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat. Proses deforestasi yang terus menerus akibat konversi hutan menjadi perkebunan dalam skala besar, pembukaan tambang, dan penguasaan hutan tanam industri telah membuat SAD kehilangan sumber penghidupannya padahal mereka belum bisa

meninggalkan kegiatan berburu dan meramu. Akibatnya rombongan ini menjadi terpecah belah dan berpindah tanpa pola untuk sekedar bertahan hidup. Suku Anak Dalam masih menerima stigma negatif dari masyarakat sekitar dimana mereka bermukim sehingga rentan terhadap perilaku diskriminasi. Tindakan pembedaan atau diskriminasi juga terjadi dalam pemberian pelayanan dasar dimana banyak dari anggota rombongan tidak menerima pelayanan kesehatan, pendidikan maupun perumahan.



Anak-anak Suku Anak Dalam (SAD) menikmati proses belajar mengajar di tengah hutan sawit.

PUISI HUTAN
HUTAN KU SANG DULU LEBAT KINI HILANG
BERGANTI SAWIT
NYAWA KAMI PU TERANCAM
KAMI DULU SANGAT SENANG HIDUP
DI HUTAN
TAPI SEKARANG KAMI HIDUP DI
KEBUUN SAWIT BABI HILANG KAMI
PUN TIDAK DAPAT MAKAN

Puisi hasil karya Ali, anak SAD dari rombongan Sargawi di Dusun Sidodadi, Desa Tanjung

Program Peduli hadir Kabupaten Merangin, Sorolangun, Bungo dan Dharmasraya untuk menjawab tantangan eksklusi sosial. Melalui Peduli diharapkan SAD yang berada di sepanjang lintas tengah Sumatera memperoleh pengakuan atas hak-hak dasarnya sebagai warga negara termasuk layanan pendidikan, kesehatan dan identitas sesuai dengan situasi sosial SAD.

Dinas Kesehatan Kab. Bungo memberikan layanan kesehatan dengan langsung mendatangi pemukiman SAD.



Membuat rombongan-rombong SAD agar menetap bukanlah persoalan yang mudah. Mereka terbiasa hidup di hutan dan berpindah-pindah. Pundi Sumatera sebagai mitra Peduli yang mendampingi SAD menekankan pentingnya livelihood melalui pengembangan ekonomi alternative. Pendampingan yang intensif dan kerjasama dengan dinas terkait pemerintah di daerah telah dilaksanakan. Saat ini SAD telah

mengembangkan budidaya ikan lele melalui media fiber dan kolam terpal. Panen besar pertama telah berhasil dilakukan pada bulan Maret 2016. Inisiatif ini telah berkembang ke rombongan lain. Dinas perikanan dan perkebunan daerah ikut menyambut baik kegiatan ini dan terlibat dengan memberikan bantuan bibit ikan dan peningkatan kapasitas pengelolaan budidaya kolam ikan. Balai Pengkajian teknologi Pertanian

(BPTP) Jambi turut memberikan dukungan berupa bimbingan teknis tentang budidaya ternak kambing, pembuatan kompos dari limbah ternak dan budidaya tanaman palawija. Untuk saat ini pun kelompok SAD telah berhasil membentuk Kelompok Tani Kubu Mandiri di Rombongan Ngilo SPA Desa Pauh Meng sebagai wadah kerjasama antar anggota di bidang pertanian dan peternakan.



Pustaka Alam SAD di Rombong Ngilo SPA Desa Pauh Menang Kab. Merangin, Jambi mulai ditata agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Komunitas Suku Anak Dalam dikarenakan kebiasaan hidup yang berpindah-pindah tidak memiliki kelengkapan identitas baik surat kelahiran bagi anak maupun KTP. Namun demikian saat ini banyak dari mereka telah difasilitasi untuk mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Tanda Komunitas (KTK) untuk SAD. Layanan kesehatan dan khitanan masal juga diberikan secara gratis atas kolaborasi berbagai pihak. Dalam hal pendidikan, masyarakat SAD sangat senang ketika menerima layanan rutin pendidikan mengajar calistung dengan konsep sekolah alam. Beasiswa diberikan kepada anak di sekolah formal. Fasilitas kunjungan mobil pintar perpustakaan merupakan salah satu favorit anak-anak SAD. Hal ini menginspirasi terbentuknya taman baca (pustaka alam) di Desa Pauh Menang.



Panen ikan yang dilakukan salah satu rombongan sebagai bentuk ekonomi alternative bagi SAD



Warga SAD mulai membuat bedeng dan menanam sayur di lingkungan sekitar pemukiman mereka

Dari aspek permukiman, beberapa rombongan telah menerima pembangunan pondok beserta bantuan bibit karet untuk kebunkebun milik SAD. Pendekatan yang sedang dicoba dilakukan adalah berusaha mengajak rombongan SAD bersedia menempati pondok yang telah dibangun dan mengolah lahan disekitarnya menjadi kebun. Komunitas SAD saat ini juga cukup bersemangat untuk membangun petak-petak tanaman di lahan pekarangan rumah komunitas SAD oleh beberapa rombongan di Merangin. Mereka menanam sayur disekitar rumah mereka yang dikerjakan secara bergotong royong. Beberapa jenis sayur yang telah ditanam seperti kangkung, bayam, cabai, terong dan tomat. Pupuk yang digunakan pun organic dengan mengambil dari kotoran ternak kambing peliharaan mereka sendiri.



Jenis pertanian ladang banyak dijumpai wilayah Pipikoro yang berbukit dengan kontur tanah cenderung curam

Berdaya di Kaki Langit Palu

Karsa Institute

Berada di ketinggian lebih dari 1800 meter di pegunungan Pipikoro, Sigi kita akan bertemu dengan masyarakat adat Topo Uma. Mereka kerap dipanggil dengan sebutan "To Tole" yang secara harfiah berarti orang gunung, orang udik, tertinggal, terbelakang dan bodoh. Masyarakat Topo Uma juga sering digunakan sebagai tenaga murah untuk mengangkut barang-barang berat karena mereka orang-orang dengan fisik yang kuat.

Dalam waktu-waktu tertentu mereka dimobilisasi untuk panen kopi, kakao atau mencari rotan. Namun demikian, ada beberapa dari mereka yang memiliki kebun kopi dan kakao sendiri. Tekanan ekonomi yang saat ini mereka alami lebih merupakan gabungan antara faktor keterisolasian,

pengucilan, strata sosial dan pelayanan publik yang belum tersedia dengan baik. Mengunjungi lima desa dampingan Program Peduli yaitu Masevo, Porolea, Lonebasa, Lawe dan Moa, kita akan disajikan oleh pemandangan hamparan perkebunan dengan komoditas utama kakao, kopi, cengkeh dan padi ladang. Desa-desa ini secara geografis terisolir dan hanya bisa dilalui dengan motor melalui jalan setapak yang sempit, berbahaya dan rawan longsor ketika hujan. Akses masyarakat adat terhadap kesehatan, pendidikan sangat terbatas.

Termasuk akses terhadap informasi pasar minim mengingat mereka perlu memasarkan hasil kebun mereka.



Kakao merupakan salah satu tanaman utama selain kopi di daerah Pipikoro



Kader pendidikan di Lonebasa sedang mengajari anak-anak PAUD

Keberadaan Program Peduli telah memberikan angin segar bagi masyarakat Topo Uma untuk mulai merasakan hadirnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan informasi pasar. Dalam hal pendidikan, Karsa Institute sebagai pendamping di daerah membentuk sanggar belajar yang mengajarkan keterampilan baca, tulis dan hitung. Sementara itu kader kesehatan

program Peduli telah dilatih dan dididik untuk mampu melakukan pemeriksaan kesehatan sendiri mengingat puskesmas maupun pustu tidak tersedia di desadesa tersebut. Sanggar layanan kesehatan kepada ibu hamil, manula dan balita telah beroperasi tiap bulannya dengan dukungan dana dari APBD desa.

Salah satu perkembangan yang cukup menarik di Pipikoro adalah produk kopi yang saat ini telah menjadi ikon di wilayah tersebut, yaitu Kopi Toratima. Penguatan ekonomi masyarakat menjadi strategi utama dalam rangka meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat adat Topo Uma.

Peningkatan kapasitas budidaya kopi serta kakao diberikan sekaligus pembentukan ekonomi kelompok melalui usaha penggilingan kopi dan pembuatan gula merah. Kopi Pipikoro yang awalnya merupakan produk desa kini pelan-pelan telah menjadi produk kabupaten dan telah mewakili Kabupaten Sigi dalam ekspo yang bertepatan dengan event nasional Sail Tomini.

Petani kopi melakukan panen dengan memilih biji-biji kopi yang sudah matang di kebun sendiri



Festival kopi Pipikoro menjadi ajang pameran kopi desa Pipikoro dilaksanakan bulan Maret 2016. Kegiatan ini sukses menghadirkan sekitar 3500 penduduk dari desa-desa sekitar serta perwakilan dari Kemendesa dan pejabat Kabupaten Sigi termasuk Bupati Sigi, wakil bupati, ketua dan anggota DPRD serta perwakilan SKPD. Festival Kopi ini menjadi titik tonggak adanya pengakuan' terhadap keberadaan Topo Uma dan potensi yang mereka miliki yang sebelumnya tidak diketahui oleh banyak pihak.

Festival ini juga melahirkan kebijakan strategis seperti dikeluarkannya skema pembangunan ekonomi kerakyatan melalui industrialisasi berbasis komoditas

kopi. Beragam komitmen pemerintah pusat dan daerah kemudian muncul termasuk inisiatif memperbaiki infrastruktur jalan dan komitmen mendorong percepatan pembangunan di wilayah terpencil melalui dana dari pusat dan daerah. Semangat untuk memperbaiki wilayah terpencil tercermin dari RPJMD Kab Sigi periode 2016 – 2021 yang telah disahkan dimana Karsa terlibat aktif dalam penyusunannya. Salah satu poin pentingnya adalah dimasukkannya program Percepatan dan Peningkatan pemerataan pembangunan yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil meliputi jalan, sarana pendidikan dan kesehatan.



Pembukaan Festival Kopi diramalkan oleh gendang musik yang dimainkan masyarakat Topo Uma sendiri



Ibu Wakil Bupati Sigi hadir dalam Festival Kopi untuk meramalkan ajang pameran Kopi di Pipikoro



Menjaga Tanah, Memelihara Adat Rimbawan Muda Indonesia (RMI)

Masyarakat Kasepuhan Jagaraksa dan Cirompang merupakan masyarakat adat yang berada di Lebak, provinsi Banten. Secara geografis, mereka berada di Kawasan Ekosistem Halimun dengan mata pencarian utama adalah petani. Masyarakat Kasepuhan merupakan salah satu kelompok adat yang masih memegang teguh dan melaksanakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam secara turun temurun dengan konsep Leuweung Kolot/Tutupan (Hutan Lindung), Leuweung

Titipan (Hutan Produksi Terbatas) dan Leuweung Sampalan/Cawisan (Kawasan Produksi). Terbitnya SK 175/2013 tentang Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat dan memunculkan konflik tenurial negara (dalam hal ini TNGHS) dengan masyarakat adat kasepuhan. Pada ranah kebijakan ketika itu juga belum terlihat adanya pengakuan Kasepuhan sebagai masyarakat adat.

Budaya gotong-royong masyarakat Kasepuhan saat panen padi



Leuit, simbol masyarakat adat dan ketahanan pangan masyarakat Sunda



Rengkong, alat untuk membawa padi hasil panen, sekaligus dijadikan sebagai alat musik tradisional



Inisiasi para perempuan Kasepuhan dalam pemenuhan kebutuhan pangan

Perjuangan Masyarakat Adat Kasepuhan untuk mendapat pengakuan akhirnya menemukan titik terang dengan disahkannya Perda Adat No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, bulan Desember 2015 lalu. Proses yang cukup panjang untuk mencapai pengakuan tersebut, yang telah dimulai sejak tahun 2006.

Keteguhan baris kolot berikut incu putu Kasepuhan untuk tetap memelihara adat, bukti kesungguhan masyarakat dalam mengelola tanah dan sumber daya alam, serta dukungan para pihak berhasil melahirkan pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan 522 kasepuhan di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Diantara ratusan komunitas adat tersebut, adalah Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Karang yang bekerja bersama dengan RMI dan sejak tahun 2014 didukung oleh Kemitraan melalui Program Peduli.

Pengakuan masyarakat adat kasepuhan ini merupakan landasan penting untuk pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat itu sendiri. Dengan adanya Perda Adat ini, tantangan masyarakat berikutnya adalah bagaimana mengelola wilayah adat secara optimal dengan bekal pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki sejak ratusan tahun yang lalu.

Keterlibatan kelompok perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, turut meningkatkan penghidupan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh para perempuan kasepuhan memberikan kontribusi nyata pada komunitas Kasepuhan dan pembangunan desa.

Masyarakat adat Baduy, yang juga bekerja bersama RMI sejak tahun 2016 melalui Program Peduli, lebih dulu mendapat pengakuan dari pemerintah dengan diterbitkannya Perda Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy. Kini masyarakat adat Baduy dan Pemerintah Desa Kanekes berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan pemanfaatan teknologi informasi.



Seba Baduy, ekspresi rasa syukur dan penghormatan masyarakat Baduy terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten dengan mempersembahkan hasil panen



Pertunjukan musik Baduy

Mendekatkan Layanan dengan Pemekaran Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)

Silak Oinan adalah kampung yang terletak di sepanjang aliran Sungai Silak Oinan, Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akses menuju lokasi ini masih sangat sulit dan bisa memakan waktu hingga 12 jam dengan kapal motor dari Padang ditambah dengan 4-10 jam perjalanan dengan long boat bermesin tempel dari kota kecamatan. Kondisi demikian menimbulkan keterisolasian dan akses yang jauh dari ibu kecamatan di pesisir pantai menjadikan masyarakat di daerah itu terpinggirkan serta minim layanan dasar.

Dalam hal pendidikan fasilitas sekolah yang ada belum bisa menampung SD kelas IV hingga kelas VI. Namun demikian, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) dalam program Peduli bersama-sama dengan

warga berhasil menjadikan SD filial Salappak menjadi SD Negeri Filial 12 Muntei Desa Muntei yang menampung anak sekolah sampai kelas VI.

Pemerintah pun telah menempatkan tambahan guru kontrak untuk mengajar anak-anak di Salappak. Begitu pula di Magosi dimana lokasi belajar dulunya di beranda rumah guru, kini mereka telah memiliki gedung sekolah baru. Layanan kesehatan yang diterima masyarakat juga membaik, terlihat dari bertambahnya petugas kesehatan di dusun Bekkeiluk, Magosi dan Salappak.



Perwakilan dari empat dusun di Silak'Oinan Siberut sedang berdiskusi mengenai pemekaran

Menyikapi hal itu pada Jumat, 10 Juni 2016 melalui fasilitasi YCMM yang mempertemukan warga Silak Oinan dengan Pemerintah Desa Muntei dimana diputuskan pemekaran Silak Oinan menjadi desa sendiri.

Bupati Mentawai menyetujui mempercepat peningkatan layanan dasar di Silak'oinan melalui pemekaran desa. Usulan Pemekaran desa sudah disampaikan ke Gubernur Sumbar dan Kemendagri. untuk itu



Kondisi sekolah UMA Di Dusun Magosi, Desa Muntei Kec. Sib. Selatan. Rumah Sekolah ini juga tempat guru tinggal.

musyawarah dengan dusun-dusun di sekitra desa Silak 'Oinan dan pemetaan calon wilayah telah dilakukan. Sikap mendukung ini juga telah terpublikasikan melalui tabloid Puailiggubat.

Publikasi dukungan bupati ini telah memberikan keyakinan kepada beberapa elit masyarakat bahwa ide pembentukan desa ini bukan semata-mata insiatif YCMM namun melibatkan pemerintah daerah.

Dalam bidang pendidikan, telah ada komitmen Dinas Pendidikan dan Bupati untuk membangun SD Negeri di Salappa melalui APBD dan APBN. Saat ini sedang dalam proses pembangunan sekolah. Pendekatan yang dilakukan oleh YCMM ke Bupati, UPTD Dinas Pendidikan Siberut Selatan dan Pihak Paroki Muara Siberut sebagai pengelola SD filial Santa Maria di Salappa', telah memberanikan Kepala UPTD Siberut Selatan mengambil keputusan untuk menjadikan SD Filial Santa Maria di Salappa' sebagai SD Negeri, yang akan dipersiapkan sebagai SD induk bagi sekolah-sekolah

yang ada di Dusun Bekkeiluk, Magosi dan Tinambu. Pembangunan akses jalan antar dusun ini diwaktu-waktu berikutnya, akan menghilangkan kendala akses dari tiga dusun lainnya ke sekolah induk tersebut. sementara itu dari aspek kesehatan, dengan melakukan pendekatan ke Dinas Kesehatan maka kini telah di tambah dua PUSTU dan petugas kesehatan di Silak'oinan (dusun Magosi dan Bekkeiluk). Saat ini Dinkes sedang merencanakan perbaikan sarana dan prasarana PUSTU termasuk transportasi untuk pasien rujukan.



Dinas Kesehatan menggunakan perahu mengunjungi masyarakat dusun untuk memberikan pelayanan kesehatan

Menggenggam Kepastian Wilayah untuk Membangun Desa

Yayasan Tanpa Batas (YTB)

Suku Boti dan Suku Bajo yang didampingi dalam program Peduli berada di Kabupaten Kupang. Suku Boti berada di Desa Boti Kecamatan KIE, Kab. Timor Tengah Selatan (TTS). Sedangkan suku Bajo bertempat di desa Sulamu, Kecamatan Sulamu. Jumlah keseluruhan suku Boti sekitar 2.169 jiwa yang terbagi dalam Boti Dalam dan Boti Luar. Mata pencaharian utama mereka adalah pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan infrastruktur jalan yang buruk dan tanah berbatu serta transportasi minim membuat desa Boti cukup terasing dari pelayanan dasar dan mengalami kekeringan terutama di musim kemarau yang mengharuskan mereka berjalan jauh demi mendapatkan air bersih. Suku Boti terutama Boti Dalam masih sangat memegang erat kearifan lokal

mereka terutama dalam memelihara sumber daya alam. Sementara itu Suku Bajo berdiam di Desa Sulamu dan Pulau Kera yang ditempuh dengan 2 jam perjalanan laut dari Kupang dengan mata pencaharian utama adalah nelayan. Ada stigma kurang baik terhadap suku Bajo yang sering disebut oleh masyarakat pendatang sebagai 'orang kumuh' oleh masyarakat rote yang berdiam di desa yang sama. Beragam perilaku diskriminasi dialami oleh Suku Bajo yang kerap tidak mendapat program pembangunan pemerintah yang menyasar hanya suku Rote. Isu legalitas juga menjadi permasalahan bagi suku Bajo terutama di pulau Kera yang dianggap bukan penduduk asli.



Yayasan Tanpa Batas mengadakan pendataan kepada Suku Boti di Desa Boti, Kec KIE Kab. TTS



Anak-anak suku Bajo di depan rumah mereka yang kebanyakan terbuat dari seng dan kayu



Anak-anak Suku Bajo belajar di sore hari di rumah guru mereka



Pulau Kera merupakan rumah suku Bajo hanya memiliki satu masjid sebagai tempat ibadah & sekolah

Untuk berinteraksi dengan masyarakat suku Boti dan Bajo bukanlah hal yang mudah. Mitra Peduli di Kupang yaitu YTB (Yayasan Tanpa Batas) melakukan pendekatan melalui isu kesehatan yang ternyata cukup efektif untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Aktivitas berbasis kesehatan yang telah berjalan misalkan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi sebab mereka masih mempraktekkan bentuk sunat tradisional yang disebut sunat sifon yang dianggap tidak bersih dan rentan terhadap penyakit infeksi menular seksual. Kemudian juga diberikan layanan klinik mobile untuk pemeriksaan kesehatan dasar serta pelatihan sunat sifon dan menginformasikan dampak buruk dari sunat tersebut dan resiko penularan IMS dan HIV. Pendidikan dasar yang selama ini terabaikan juga telah diupayakan dengan menyelenggarakan kegiatan belajar untuk anak Suku Boti. Dalam yang sebelumnya telah dibuatkan modul sesuai kebutuhan anak-anak suku Boti dan Bahasa pengantar menggunakan bahasa mereka

sebab tidak banyak yang fasih menggunakan Bahasa Indonesia. Sementara itu hal yang serupa terjadi pada suku Bajo dimana proses belajar mengajar dilakukan di masjid dan satu rumah kosong dengan guru yang bergantian. Nantinya anak-anak ini akan mengikuti ujian persamaan.

Pelibatan warga dalam proses musrenbang sudah mulai dilakukan terutama pada suku Boti meski jenis partisipasi yang dilaksanakan masih formalitas. Namun demikian masyarakat Boti dan Bajo menjadi paham mengenai mekanisme perencanaan dan pentingnya untuk terlibat dalam forum musrenbang desa. Penerimaan terhadap keberadaan suku Boti dan Bajo cukup terlihat sebab kini pemerintah sudah mau secara langsung melihat kehidupan kedua suku tersebut. Angin segar ini diharapkan dapat memberikan perbaikan kesejahteraan baik bagi suku Bajo maupun Boti. Perbaikan pelayanan tentu saja akan terus diupayakan dan pembangunan yang diberikan akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan warga.



Pelayanan Medis bagi Suku Boti yang diikuti baik anak-anak maupun dewasa

Empati untuk Integrasi Sosial Suku Sawang

Air Mata Air (AMAIR)



Tradisi 'Muang Jong' sebagai ritual sedekah laut suku Sawang di Kepulauan Bangka Belitung

Mengunjungi wilayah Kabupaten Belitung Timur, kita akan bertemu dengan komunitas Adat Suku Sawang atau biasa disebut dengan suku laut atau Sekak yang secara harfiah berarti berbicara kencang. Perkataan Sekak ini dikemudian hari menjadi stereotype bagi suku sawang yang diasosiasikan negatif seperti berpendidikan rendah, miskin, bodoh dan jorok. Saat ini jumlah suku sawang di Kepulauan Bangka Belitung hanya tersisa sekitar 900 orang yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil.

Komunitas adat Suku Sawang awalnya tinggal di laut dan berpindah-pindah tergantung pada potensi laut yang ada. Namun pada akhir tahun 70'an pemerintah merelokasi mereka ke darat untuk menjadi pekerja di PT. Timah Antara sebagai penjahit karung timah, pemotong besi dalam laut, tukang pikul karung timah dan sebagainya dengan upah rendah. Karena relokasi inilah, suku Sawang tercerabut dari akar budayanya dan kehilangan keahlian sebagai pelaut. Generasi muda Suku Sawang Gentong tidak lagi mempraktekkan budaya leluhurnya.

Menghadapi kian lunturnya budaya suku Sawang, LPMP Amair sebagai pengampu Program Peduli di Belitung Timur bersama sama suku Sawang berupaya menghidupkan kembali kebudayaan dengan memperkuat kelembagaan Sanggar Seni ‘Gajah Manunggang’, menyusun buku tentang adat istiadat suku sawang dan mengadakan festival budaya Suku Sawang Genting dan Melayu Belitung yang bernama Muang Jong. Pendekatan kebudayaan cukup efektif sebagai pemicu munculnya kecintaan suku Sawang terhadap adat dan kebudayaan asalnya.

Selain upaya menumbuhkan kembali kebanggaan terhadap kebudayaannya, masyarakat Suku Gentong juga di dorong untuk mempelajari keterampilan lain seperti computer terutama bagi kaum muda suku sawang, kemudian mereka juga dikenalkan metode urban farming dengan media aquaponik dan hidroponik serta membuat kerajinan miniature ‘Jong Suku Sawang’ sebagai miniature pariwisata. Integrasi sosial sebagai tujuan program Peduli sudah mulai terlihat antara komunitas suku Sawang dan non-Sawang. Masyarakat yang bukan Suku Sawang ini tinggal bersebelahan dengan komunitas Suku Sawang dan bermata pencaharian yang sama sebagai buruh tambang timah. Mendorong pembauran mereka dan suku sawang tidaklah mudah karena adanya stigma negative tersebut. Berbagai aktivitas yang membaurkan kedua pihak dilaksanakan melalui pelatihan kader, pelatihan pengorganisasian dan pertanian bersama untuk saling mendekatkan dengan warga sekitar dan mengurangi adanya stigma yang kurang baik terhadap suku Sawang.



Pemuda Suku Sawang berpartisipasi sebagai Penari dalam Rombongan Pawai Suku Sawang



Warga Sawang Menghias ‘Replika Perahu Jong Sawang’ pada Pawai Pembangunan 17 Agustus 2015



Kesetaraan Dimata Negara Untuk Pelayanan Publik

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhamadiyah (MPM) Sorong

Suku Kokoda pada dasarnya merupakan masyarakat nomaden yang tinggal disekitar laut dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan. Suku Kokoda yang saat ini berada di Kampung Makbusun Distrik Mayamuk, Sorong telah menetap sejak tahun 2002. Sebelumnya mereka hidup berpindah-pindah pasca pengusuran tahun 1980. Sebagain menetap di kampung ini dan sisanya hidup menyebar di berbagai lokasi di Sorong. Pada awalnya pola hidup mereka menetap mendekati pusat perkebunan sagu sebagai makanan pokok masyarakat. Mata pencaharian yang utama adalah nelayan, namun pada saat tidak musim ikan atau gelombang besar, mereka akan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dikarenakan karakter kehidupannya yang berpindah pindah maka permasalahan utama mereka adalah ketidakpastian ruang hidup dan penghidupan. Demikian pula yang terjadi dengan Suku Kokoda di Makbusun. Mereka masih hidup menumpang di atas tanah yang

sekarang mereka huni, kecuali lahan seluas 2 hektar yang dihibahkan oleh MPM Muhammadiyah. Sebagai warga pendatang, Suku Kokoda mendapat stigma kurang baik dan dikenal sebagai pemalas dan pencuri. Pelayanan dasar juga masih minim meskipun warga sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Atas dasar inilah akhirnya komunitas suku Kokoda mengajukan permohonan pemekaran menjadi kampung tersendiri. Pada akhir tahun 2015 desa warmon Kokoda resmi menjadi desa definitif.



Desa Warmon Kokoda di Sorong resmi menjadi desa definitif sejak 2015

Anak-anak Kokoda mengikuti kegiatan belajar di satu-satunya sekolah di desa Warmon Kokoda



Tantangan menjadi desa definitif bukanlah ringan. Ada banyak permasalahan mengenai sumber daya manusia, livelihood, infrastruktur termasuk tempat tinggal dan penyediaan air bersih. Dari sisi SDM, Desa Warmon Kokoda akan membutuhkan perangkat desa yang mumpuni. Oleh karena itu berbagai bentuk peningkatan kapasitas untuk penggunaan dana desa telah diberikan melalui workshop dan lokakarya. Selain itu pelayanan dasar juga mulai diberikan termasuk hak desa atas dana Desa, Dana Otsus dan berbagai jenis perlindungan sosial dari Negara seperti KIP dan KIS. Berbagai aktivitas kesehatan juga dijalankan bersama dengan posyandu untuk pemeriksaan kesehatan warga terutama anak dan manula. Tenaga medis dari Dinas Kesehatan Sorong untuk Pustu di Warmon Kokoda. Terkait permasalahan perumahan, atas upaya advokasi kepada pemerintah, kini suku Kokoda telah memperoleh bantuan berupa 50 unit rumah dari Kementerian PU PERA.

Integrasi sosial suku Kokoda dengan masyarakat sekitar dilakukan dengan menginiasi berbagai aktivitas bersama seperti kemah inklusi, jalan santai bersama dengan siswa siswi SMP dan SMA di Kab Sorong serta mahasiswa. Upaya integrasi juga dilakukan melalui kegiatan pertanian dimana beberapa warga sekitar membantu penguatan cara-cara bertani. Saat ini telah dilakukan sarasehan pertanian, menyiapkan lahan khusus pertanian, mengolah tanah dan cara menanam yang baik dan benar. Panen dilakukan bersama dengan warga sekitar. Interaksi ini membawa hasil positif yang dapat mendekatkan dan mencairkan relasi warga Kokoda dengan masyarakat sekitar. Nantinya mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah akan melaksanakan KKN di desa warmon Kokoda selama enam bulan dan melakukan kegiatan pertanian, pendidikan dan kesehatan. Kegiatan ini akan membantu warga Kokoda menjadi lebih mandiri dan terbiasa untuk menjalin relasi dengan orang dari luar suku Kokoda.



Kiri :

Kepala Desa Warmon Kokoda meresmikan pembangunan bantuan rumah sebanyak 55 unit dari Kementerian PUPR

Kanan :

Pelayanan kesehatan diberikan kepada Suku Kokoda



Suku Kokoda bergotong royong membersihkan areal lahan yang akan dibangun perumahan dari Kementerian PUPR

Perempuan Bergerak Mendorong Inklusi Sosial

Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)

Jakarta memiliki komunitas Cina Benteng dengan sejarah dan budaya yang unik. Tidak seperti kebanyakan orang cina pada umumnya, orang cina benteng memiliki raga fisik yang agak berbeda dimana kulit mereka cenderung lebih hitam dan secara ekonomi tidak sebaik masyarakat cina pada umumnya. Diskriminasi terhadap minoritas cina sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia dimana eksistensi etnis Tionghoa dibatasi sehingga mereka tidak dengan bebas melakukan aktivitas budaya, adat istiadat dan agama sesuai tradisi mereka. Meski praktik pembatasan ini sudah sangat berkurang dan kebebasan ekonomi telah diberikan namun masih ada komunitas Cina yang hidup dengan diskriminasi, stereotype, stigma selama berpuluh-puluh tahun sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Cina Benteng. Akibatnya beberapa akses pelayanan dasar tidak terpenuhi seperti layanan kartu identitas, kesehatan dan pendidikan.



Tari Cokek Sipatmo yang merupakan tarian khas masyarakat Cina Benteng dipentaskan dalam acara memperingati hari Bumi

Pemberdayaan kepada kelompok perempuan merupakan pintu masuk ke dalam komunitas Cina Benteng. Penguatan kapasitas diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka secara mandiri *m a m p u m e n y u a r a k a n* kepentingannya. Kelompok sasaran adalah perempuan dikarenakan berdasar penilaian awal yang menunjukkan bahwa kelompok laki-laki cina benteng memiliki kesibukan ekonomi yang tinggi karena tekanan kemiskinan. Sementara itu mayoritas perempuan lebih banyak menjadi ibu rumah tangga dan bekerja dari rumah. Intervensi melalui kelompok perempuan menjadi pilihan sebab mereka diharapkan menjadi motor penggerak terjadinya penerimaan sosial.

Salah satu capaian terbesar dalam mendampingi komunitas Cina Benteng adalah terbentuknya Koperasi Wanita Pengembang Sumberdaya (KWPS) Lentera Benteng Jaya yang kembali memperkenalkan Tari Cokek Sipatmo, sebagai sebuah tarian pertunjukan yang indah dan mengandung nilai-nilai spiritual yang agung, bukan sebagai tarian yang

selama ini masyarakat kenal sebagai tarian yang seronok dan erotis dan lebih banyak bersifat sebagai tarian penghibur laki-laki. Ibu-ibu koperasi Lentera Benteng Jaya mengembangkan tari Cokek Sipatmo bertujuan merevitalisasi nilai-nilai yang terdistorsi dan kembali menjadi tarian Agung yang dipersembahkan pada acara khusus, seperti upacara di kelenteng, perkawinan atau Perayaan tahun baru Cap Gomeh. Tari Cokek Adalah seni pertunjukan yang berkembang pada abad ke 19 M di Kota Tangerang, Propinsi Banten. Tarian ini dimainkan oleh sepuluh orang penari wanita, dan tujuh orang laki-laki pemegang *Gambang Kromong*, alat musik yang mengiringinya.

KWPS Lentera Benteng Jaya melalui kelompok kue yang diberi nama “Lentera Cake” mulai dikenal sebagai Lembaga koperasi yang memiliki usaha ekonomi dan ingin melestarikan kue-kue khas Cina Benteng melalui produksi kue kering :kue sagon, kue satu, kue lidah kucing pelangi, kue nastar dan kue biji ketapang dengan wijen putih dan mengikuti bazar bulan Ramadhan tingkat kelurahan di Kecamatan

Neglasari dan car free day. KWPS Lentera Benteng Jaya melalui kelompok tani yang diberi nama “KWT Lentera” mulai dikenal sebagai Lembaga operasi yang memiliki usaha pertanian sayuran organik mendukung program Tangerang Berkebun dan Kampung Hijau di Kelurahan Mekarsari .Telah memperoleh pelatihan pertanian organik dari Dinas pertanian. Kemandirian ekonomi telah membangkitkan rasa percaya diri kelompok perempuan Cina Benteng sehingga mereka memiliki keberanian untuk bertemu dengan pemerintah dan meminta hak-hak mereka terutama untuk mendapatkan akte lahir, KK, KTP dan BPJS. Selain itu mereka kini juga telah terlibat dalam Musrenbang di Kelurahan Mekarsari.



atas :
*Koperasi Wanita Pengembang Sumberdaya (KWPS)
Lentera Benteng Jaya milik perempuan Cina Benteng
buka kas di rumah anggota, RW 04 Sewan Lebakwangi*

bawah :
*Ibu-ibu KWPS Lentera Benteng Jaya praktek membuat kue basah
di Bogasari Baking Center, Cilincing, Jakarta Utara*

atas :
*Pelatihan Analisis Gender mengupas tentang identitas diri,
identitas sosial perempuan dan warga Cina Benteng.*

bawah :
*Pertemuan dengan pemerintah
terkait layanan dasar bagi warga Cina Benteng.*

Tanah Leluhur Wadah Inklusi

AMAN RIAU

Masyarakat adat Talang Mamak adalah salah satu kelompok komunitas di Provinsi Riau yang—bahkan sebelum nama Indonesia terfikirkan oleh para pendiri bangsa—sudah hidup dan menetap di sepanjang kawasan kabupaten Indragiri sekarang. Dalam berbagai publikasi mereka yang menyebut dirinya "Suku Tuha" ini dikategorikan ke dalam golongan melayu tua (*proto melayu*) dan juga dianggap suku asli Indragiri. Kehidupan mereka sebagian besar bergantung dan berpusat pada hutan baik sosial dan budaya. Bagi orang Talang Mamak, kepemilikan kawasan hutan adalah komunal, sedangkan kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan kepemilikan pribadi yang diturunkan berdasarkan keturunan. Sedangkan kawasan sungai adalah kepemilikannya berkelompok . Sebagian besar tanah yang datar dijadikan lahan perkebunan karet, peternakan dan perikanan.



Gawai adat Talang Mamak sekaligus penyerahan peta wilayah adat pemerintahan daerah, provinsi dan KLHK

Keseimbangan hidup masyarakat adat Talang Mamak mulai terusik, saat pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang memetak-metak seluruh kawasan hutan adat dan tempat-tempat keramat mereka, dengan kebijakan bidang kehutanan. Memberi izin HPH membat hutan mereka, mengirim transmigrasi, dan belakangan ekspansi perusahaan perkebunan sawit bersekala besar, membuat komunitas adat yang berjumlah lebih dari 6000 jiwa ini mengalami eksklusi, termarginalkan bahkan tidak nyaris tidak mendapatkan akses hak-hak dasar sebagai warga negara. Kini, mereka tidak lagi dapat berladang dengan pola dan pengetahuan agraris yang diwariskan nenek moyang, mereka tersudut di semak-semak dan tanah yang telah kurus sumberdaya.



Penggalian sejarah adat dan membuat tatakelola wilayah adat

Di tengah-tengah situasi itu, sekelompok suku Talang Mamak *tigabalai* di bawah kepemimpinan Patih Laman pernah dengan gigih mempertahankan hutan dan menentang tindakan perampasan dan perusakan tempat-tempat keramat mereka. AMAN Riau melalui Program peduli telah memperkuat komunitas untuk melakukan Pemetaan, Penguatan lembaga dan kapasitas masyarakat Talang Mamak agar mereka sebagai warga negara tidak ditinggalkan dalam proses-proses pembangunan. Program peduli juga membantu masyarakat Adat Talang Mamak dapat mempertahankan eksistensinya dan memperoleh hak-hak dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka sebagaimana warga negara lainnya di republik ini.



Mengidentifikasi potensi ekonomi masyarakat adat Talang Mamak melalui penguatan kapasitas masyarakat adat

Menjaga Hutan, Menjaga Warisan Budaya

AMAN MALUKU



Suku Nuaulu di Pulau Seram mempersiapkan upacara adat penutupan atap Baileo, rumah adat Maluku



Tari Cakalele,
dalam rangkaian acara Maku-maku,
sebagai ritual bagi anak lelaki
suku Nuaulu yang beranjak dewasa

Suku Nuaulu merupakan salah satu suku di Maluku yang berdiam di Pulau Seram. Mata pencaharian utamanya adalah memanfaatkan hasil hutan, mengelola tanaman kelapa dan pertanian. Program Peduli bersama dengan AMAN Maluku bekerjasama dengan suku Nuaulu di 7 negeri atau kampung yaitu Nuanea, Nueletetu, Simalouw, Bonara, Rohua, Watane, Rohua Waemanesi. Secara adat ke tujuh negeri atau kampung tersebut di bawah pemerintahan negeri adat Nuanea, tetapi secara administrative dibawah pemerintahan negeri Sepa. Adanya dua kepemimpinan tersebut membuat muncul beberapa persoalan program atau bantuan sosial lebih

diutamakan untuk diterima suku Sepa dibanding suku Nuaulu. Ke dua, meski Petuanan suku Nuaulu diakui, tetapi keputusan secara legal dan administratif ditentukan oleh negeri Sepa. Akibatnya pemerintah negeri Sepa yang memiliki kuasa untuk mengelola wilayah adat Suku Nuaulu tanpa ada kompensasi. Selain itu, suku Nuaulu juga berkonflik dengan departemen kehutanan dalam hal penetapan kawasan hutan. Pemerintah menetapkan hutan keramat sebagai hutan Lindung. Akibatnya Suku Nuaulu tidak boleh memanfaatkan hasil hutan dan binatang yang dibutuhkan untuk ritual adat.



Masyarakat Nuauulu mengikuti pelatihan analisa sosial

Suku Nuauulu memiliki kekayaan adat dan masih memegang teguh tradisi mereka. Untuk itu AMAN Maluku secara aktif mendokumentasikan sejarah dan kekayaan budaya yang dilakukan oleh anak-anak muda Nuauulu melalui wawancara dengan tua-tua atau pemimpin adat. Proses ini disatu sisi memberi dampak positif bagi remaja Nuauulu untuk lebih mengenal budayanya sendiri dan pendokumentasian ini penting sebagai bentuk konservasi kebudayaan.

Program Peduli bersama dengan Aman Maluku mendorong adanya pengakuan hak-hak adat suku Nuauulu dan terjamin hak-hak dasarnya. Pemerintah

didorong untuk memberikan perhatian terhadap suku Nuauulu dan mengembalikan hak-hak suku Nuauulu untuk mengelola sumberdayanya sendiri. Untuk itu Aman Maluku telah mempersiapkan Kertas Posisi pengakuan Hak Adat dan Pembuatan Peraturan Masyarakat Adat. Kertas posisi diajukan kepada pemerintah sebagai bahan konsiderasi pengakuat Hak adat. Pada tingkatan masyarakat, kader juga telah disiapkan dan diberikan pelatihan analisa sosial, membuat peta indikatif dan menyusun rencana aksi masyarakat. Pelatihan Ansof dirasa penting, sebagai langkah untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang bagaimana melakukan kajian sederhana terhadap setiap masalah



Pemuda suku Nuaulu menikmati sore hari dengan bermain sepak bola

sosial yang mereka hadapi di kampung. Dengan alat-alat bantu yang dilatihkan, mereka dapat mendalami masalah yang terjadi hingga menemukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan.

Program Peduli juga memfasilitasi disusunnya Peraturan Negeri Nuanea dimana para Pemimpin adat yang terdiri dari suku dan kepala-kepala marga yang disapa sebagai *Upu Ama*. Biasanya mereka hanya akan keluar untuk upacara adat. Namun demikian mereka bersedia membuka diri dan berdiskusi dengan warga masyarakat untuk membicarakan mengenai pentingnya pengaturan wilayah adat dalam bentuk

peraturan negeri. Dalam pertemuan ini para Upu Ama mendapatkan informasi tentang hak-hak masyarakat adat yang juga merupakan bagian dari HAM yang dilindungi hukum perundang-undangan di Negara ini.



Petrus Asuy, tokoh adat yang menerima penghargaan Equator Prize dari UNDP atas jasanya mempertahankan hutan adat

Ekonomi sebagai Jembatan Inklusi

Kawal Borneo Community Foundation (KBCF)

Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) merupakan mitra Peduli di wilayah Kalimantan Timur yang mendampingi komunitas Dayak Banuaq Ohokng di Kabupaten Kutai Barat. Program Peduli mendorong adanya komunikasi Masyarakat Muara Tae dan Muara Ponaq tentang pengelolaan potensi desa. Antara kedua desa ini juga terdapat permasalahan konflik tata batas yang sudah lama tidak terselesaikan. Namun demikian

isu ekonomi dapat dijadikan sebagai titik masuk dan 'perekat' antara kedua masyarakat. Terlebih lagi terdapat seorang tokoh utama perlawanan masyarakat Muara Tae terhadap perusahaan sawit, Bapak Petrus Asuy, terlibat aktif dalam dialog kedua desa ini. Kini kedua masyarakat dapat duduk bersama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi dengan mengesampingkan konflik yang terjadi.

Pengembangan ekonomi yang coba dilakukan adalah karet sebab mayoritas penduduk kedua desa tersebut memiliki kebun karet. Pelatihan teknik budidaya karet telah disampaikan termasuk teknis penerasan getah karet yang baik serta membuat produk karet dalam bentuk lembaran sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. KBCF juga telah melakukan Kajian Analisis Rantai (VCA) Karet yang hasil analisisnya akan disampaikan kepada Bupati. Kelompok tani di Muara Tae juga telah membentuk Gapoktan sebagai ruang belajar bagi petani karet yang secara rutin bertemu. Melalui Gapoktan timbul kesadaran untuk menambah kegiatan ekonomi (livelihood) selain karet dan ladang padi yaitu menanam sayur mayur. Selain itu dengan adanya Gapoktan telah memberikan jalan adanya integrasi sosial antara ketiga kelompok masyarakat di Muara Tae yaitu SS-NOL, Abu-Abu, dan Pro Sawit sudah bisa melakukan kegiatan bersama melalui kegiatan Gapoktan.

Penguatan pemerintahan kampung menjadi salah satu aktivitas utama dalam Program Peduli. Melalui berbagai audiensi dengan pemerintah termasuk dengan Bupati diperoleh informasi bahwa penerapan Undang-Undang Desa masih membutuhkan banyak bantuan dari pihak non-pemerintah untuk memperkuat kapasitas bagi kepala desa dan pendamping desa. Fasi I i tasi diberikan kepada desa dalam hal penyusunan RPJMDesa dan RAPBDesa yang inklusif. Sistem Informasi Desa (SID) sebagai mandat UU Desa telah di mulai di desa Muara Ponak dan saat ini sedang diupayakan agar setiap desa di wilayah Kecamatan Jempang bisa memiliki SID.

Keterangan foto:

Kiri Atas

Petrus Asuy dan anaknya memperlihatkan peta luasan hutan adat yang kian mengecil karena beralih menjadi lahan sawit

Kanan Atas

Pelatihan Manajemen bagi Gapoktan di Muara Tae dan Muara Ponaq sebagai ruang belajar bersama

Kiri Bawah

Gapoktan menjadi wadah belajar bersama petani karet serta meningkatkan kapasitas gapoktan

Kanan Bawah

Tim Kemitraan dan KBCF mengunjungi desa Muara Tae untuk mengetahui lebih jauh mengenai konflik tata batas





Tarian Menyelama Sakai Dan Datun Julut dilakukan di dalam Lamin Adat, sesudah para tamu atau undangan berada di dalam.

Menyemai Bumi Menghaturkan Syukur di Tanah Lung Anai

DESANTARA

Desa Lung Anai terletak di hulu Kota Tenggarong, ibukota Kab. Kutai Kartanegara. Sejak tahun 1984, desa ini menjadi bagian dari Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu. Suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan mendiami desa Lung Anai yang kini telah ditetapkan sebagai Desa Budaya. Salah satu budaya yang tetap dilaksanakan masyarakat sebagai bagian dari adat istiadat Suku Dayak Kenyah adalah upacara Pesta Panen Lung Anai atau Uman Undrat.

Pesta panen ini adalah bentuk ucapan rasa syukur warga desa budaya Lung anai karena telah melakukan panen Padi Ladang. Walaupun pada tahun ini banyak padi warga yang gagal panen diakibatkan oleh kemarau panjang namun pesta panen tetap di gelar sebagai bentuk ucapan syukur terhadap hasil panen yang di dapatkan. Pesta panen ini berlangsung di desa Budaya Lung Anai dan dipusatkan di lamin Adat desa Budaya lung Anai.

Pesta panen diikuti oleh seluruh warga desa budaya Lung Anai. Selain warga Lung Anai, Pesta panen ini juga dihadiri oleh warga desa sungai payang dan tamu dari kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Samarinda yang kesemuanya berbaur mengikuti kemeriahan

pesta panen. Kegiatan inti uman undrat dimulai dengan mengangkat lesung panjang masuk ke lamin adat desa setelah itu kemudian beras ditumbuk di lesung panjang, setelah beras ditumbuk sampai menjadi tepung kemudian beras dikeluarkan dari lesung dan diayak lalu dimasukkan kedalam bambu untuk dimasak. Setelah dimasak dengan cara di panggang di bara api kemudian undrat tersebut dibagikan kepada tamu undangan yang hadir dan seluruh warga untuk dimakan secara bersama-sama dengan hati yang gembira, penuh syukur bahwa terbukti hasil pekerjaan warga berhasil dan dapat dinikmati.

Terbentuknya desa budaya yang telah diresmikan sejak 2005 hingga kini belum mendapatkan cukup perhatian dari Dinas Pariwisata untuk pengembangan wisata budaya di Desa Lung Anai. Beberapa kali audiensi kepada Pemerintah Daerah kerap mengangkat permasalahan desa budaya dan permasalahan isu tata batas yang cukup menyita tenaga dan perhatian karena tidak kunjung selesai. Audiensi yang telah dilakukan ke DPRD II dan SKPD terkait di Kutai Kartanegara. Pada tahap ini pemerintah memberikan komitmennya untuk mendukung penyelesaian konflik lahan di lung anai.



Penyembelihan Babi bentuk pengorbanan dan ucapan rasa sukur atas pesta panen



Lesung panjang digotong pemuda ke Lamin Adat dengan tujuan menumbuhkan kebersamaan dan kegotong-royongan



Tarian Udoq Kitaq dan Udoq Kiba bertujuan mengusir hama yang mengganggu tanaman dan mengusir roh jahat yang mengganggu ketentraman warga

Mengurai Tradisi Menjawab Eksklusi

SAMANTA

Bumi Nusa Tenggara Timur dan Barat memiliki banyak potensi baik alam maupun kekayaan budaya yang melimpah. Program Peduli menggandeng Samanta Foundation melakukan pendampingan bagi masyarakat adat desa Maumba dan Meuramba di Kab. Sumba Timur, NTT serta masyarakat Dusun Tumpang Sari di Desa Mekarsari Kab. Lombok Timur, NTB.

Masyarakat desa mauramba dan meuramba adalah masyarakat adat yang bersifat feudal dengan tiga strata sosial, yaitu ; maramba sebagai kelompok bangsawan, kelompok masyarakat bebas dan kelompok atta (hamba/budak). Adat atau tradisi melahirkan sistem penguasaan tanah dan sumber daya yang timpang, dimana Kelompok maramba mempunyai penguasaan tanah luas dan kepemilikan ternak yang banyak, kelompok masyarakat merdeka memiliki tanah terbatas, kira-kira 0,5 hektar lahan produktif perkelapa keluarga, sedangkan kelompok atta tidak memiliki tanah dan ternak sama sekali. Kelompok atta menggantungkan hidupnya kepada kelompok maramba sebagai “anak rumah” bagi keluarga-keluarga maramba. Mereka melakukan pekerjaan domestik dan mengerjakan tanahtanah keluarga maramba dan memelihara ternak-ternak mereka. Karena itu tugas Program Peduli adalah memastikan kelompok Atta, meskipun tetap dalam strata sosialnya, menerima pelayanan publik yang sama dalam hal pendidikan, kesehatan, identitas dan layanan social lainnya.



Prosesi Pani nDangu Tau
*merupakan ritual Suku Sumba yaitu prosesi penghormatan
keluarga perempuan terhadap saudara laki-laki suami
biasanya dilakukan malam hari dan diakhiri
dengan pemotongan hewan babi*



Anak-anak Dusun Wangga Muduk di Desa Meurumba bermain riang di kuburan keluarga

Sementara itu masyarakat Dusun Tumpang Sari sebenarnya adalah kelompok pendatang di desa mekar sari kabupaten Lombok timur NTB. Masyarakat dusun tumpang sari adalah masyarakat yang sama dengan masyarakat desa mekar sari lainnya yaitu dari suku sasak, namun secara sosial mereka dianggap berbeda. Masyarakat dusun tumpang sari berasal dari desa Ketangga dan Masbagek yang pindah dan menetap di desa mekar sari karena Keterbatasan lahan di desa asal mereka. Dusun Tumpang Sari sendiri berada disekitar kawasan hutan lindung gunung Rinjani yang berada kira-kira 600 M diatas permukaan laut. Dusun Tumpang Sari terpencil secara geografis sehingga berakibat pada minimnya sarana – prasarana kesehatan. Pada masyarakat disini, program Peduli hadir untuk

menghilangkan stigma sebagai orang asing untuk mengurangi isolasi sosial yang dialami, penguatan ekonomi untuk memperkuat kepercayaan diri warga dan berani berpartisipasi dalam pembangunan.

Sejauh ini pemerintah desa telah berkomitmen tertulis bersama dengan Tim Sebelas atau tim penyusun untuk memastikan bahwa Musrebangdes dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Berbagai komitmen pemerintah juga telah diterima seperti Dukcapil yang bersedia membantu warga untuk pembuatan administrasi kependudukan dan komitmen Dinas Koperasi dan UMKM membantu kelompok wanita tani di desa Mekarsari untuk pengurusan label halal dan sertifikasi lain yang dibutuhkan.



Kelompok wanita tani di Desa Mekarsari sedang berdiskusi mengenai kegiatan ekonomi mereka



Pahamang,
yaitu keluarga kedua mempelai yang akan menikah bermusyawarah menentukan jumlah hewan ternak yang akan diserahkan pihak laki-laki kepada perempuan

Ekonomi Warga Penyangga Desa Sulawsi Community Foundation (SCF)

Desa Kahayya di Kecamatan Kindang Kab Bulukumba dan Desa Bulo-Bulo di Kec Pujananting Kab Barru merupakan dua desa di Sulawesi Selatan yang menjadi daerah dampingan Program Peduli. Penduduk desa Kahayya sebagian besar adalah petani dengan produk unggulannya Kopi dan Tembakau. Permasalahan utama yang ditemukan di desa ini adalah terkait rendahnya harga jual produk mereka karena keterbatasan sarana prasarana transportasi. Selain itu masyarakat juga belum memiliki cukup kemampuan untuk mengemas hasil produksi mereka sehingga Program Peduli juga memfasilitasi peningkatan kapasitas para petani kopi di desa Kahayya.

Hingga saat ini telah diperoleh komitmen dari desa melalui kepala desa untuk penguatan kelembagaan usaha masyarakat melalui kegiatan studi banding, pelatihan dan rencana pembentukan BUMDes. Selain itu desa juga berkomitmen untuk menjadikan Desa Kahayya menjadi sentra kopi melalui pembangunan pasar desa. Desa Kahayya telah menerbitkan berbagai SK Desa untuk mendukung komitmen pemerintah desa, diantaranya SK desa yang mengatur tentang pembentukan kelompok tani hutan kemasyarakatan dan pengurusan ijin usaha pemanfaatan hutan HKM. Saat ini pemerintah daerah kabupaten bulukumba juga membantu memfasilitasi peralatan pengolahan kopi.



Pelatihan pemilihan bambu untuk pembuatan kerajinan bambu bagi warga desa Kahaya



Painda,
seorang pemain musik gambus yang juga bekerja sebagai satpam sekolah, sedang mengajari anak sekolah memainkan alat musik tradisional disaat jam pelajaran kosong



*Nuru',
salah seorang warga
yang terstigma sedang
mengikuti sosialisasi Perdes
di dusun labaka terkait
inklusi sosial*

Sementara itu kelompok Kelompok To Balo dan To Garibo di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru memiliki cerita eksklusif yang hampir serupa dengan desa Kahayya. Mata pencaharian utama penduduk Desa Bulu-Bulu adalah sebagai petani dan peternak. Masyarakat mengandalkan sawah tadah hujan yang diperuntukan untuk persawahan, kebun kacang tanah, kebun jagung. Peternakan yang paling dominan adalah sapi, selain kuda. Saat ini masyarakat

berprofesi sebagai petani aren memiliki peluang peningkatan ekonomi rumah tangga melalui terbentuknya sebuah kelompok tani gula aren yang menghasilkan produk gula semut. Disamping itu, lembaga BUMDES membentuk bidang pemasaran dan produksi dalam produk gula semut dan madu untuk membantu masyarakat dalam mempromosikan produksinya ke pasar luar. Komitmen dari Bappeda untuk memfasilitasi produk gula semut di tingkat



Pelatihan pembuatan kerajinan bambu

pengemasan dan pemasaran sangat membantu mereka terlebih jika kemudian Bappeda membantu untuk membuka koordinasi dengan Dinas Disperindag Kab. Barru.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda akan siap memfasilitasi produk gula semut ditingkatkan pengemasan dan pemasaran serta mengkoordinasikan dengan Dinas Disperindag Kab. Barru; 4. Hasil mini

workshop disamping memberikan masukan kepada Pemda tentang hubungan pembangunan di hulu dan hilir, juga tentang berbagi peran dan fungsi baik kabupaten, desa, dan SCF. Kegiatan ekonomi sekali lagi menjad strategi yang efektif untuk mendekatkan satu masyarakat dengan lainnya. Bukan hanya ekonomi, namun kegiatan seni juga telah meningkatkan rasa keberterimaan tersebut baik pada tingkat pemerintah maupun komunitas.

Terima Kasih

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Sosial

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Kesehatan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

The Asia Foundation (TAF)

SSS Pundi Sumatera **Karsa Institute** Desantara **Sulawesi Community Foundation**

Samanta Foundation Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Sorong

Kawal Borneo Community Foundation **Rimbawan Muda Indonesia** Yayasan Tanpa Batas **AMAN Maluku**

AMAN Riau LMPM Amair **Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita** Yayasan Citra Mandiri Mentawai

